

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTES

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengertian kompetensi dan sumber daya manusia yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Moehariono (2012:5) mengemukakan bahwa:

“Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu”.

Adapun menurut Ardeno Kurniawan (2015:118) mengemukakan bahwa:

“Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya”.

Sedangkan Hutapea dan Thoha, (2008:7) mengemukakan bahwa:

“Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut”.

Menurut Narawi dalam Chr. Jimmy L. Gaol (2015:44) mengemukakan bahwa:

“Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif)”.

Sedangkan Wirawan (2015:18) mengemukakan bahwa:

“Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

2.1.1.2 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Moehariono (2012:6) komponen utama pembentukan kompetensi diantaranya:

1. “Pengetahuan (*Knowledge*).
2. Keterampilan (*Skill*).
3. Sikap (*Attitude*).”

Adapun penjelasan indikator kompetensi sumber daya manusia yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*Knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu).

2. Keterampilan (*Skill*) merupakan suatu kemampuan dan upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal.
3. Sikap (*Attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengertian Sistem Pengendalian Internal yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Mulyadi (2010:163) mengemukakan bahwa :

“Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”

Menurut Mahmudi (2011:251) mengemukakan bahwa :

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut I Gusti Agung Rai (2008: 283) mengemukakan bahwa :

“Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien.

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Dari pengertian sistem pengendalian intern yang diberikan, tercakup pula tujuan pengendalian intern itu sendiri yang menurut Mulyadi (2016:129) yaitu:

1. “Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi

Manajemen memerlukan informasi yang teliti dapat dipercaya dan tepat pada waktunya untuk mengolah kegiatan-kegiatan perusahaan.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Pengawasan yang memadai diperlukan untuk melindungi barang-barang atau harta milik perusahaan yang mungkin hilang karena dicuri, disalahgunakan, rusak karena kecelakaan atau musibah dan sebab-sebab lain yang dapat merugikan perusahaan.

3. Mendorong efisiensi kerja atau operasional perusahaan

Mekanisme pengawasan atau pengendalian intern yang diasosiasikan dengan para personil dan kegiatannya, dimaksudkan untuk mencegah atau menghindari terjadinya berbagai peristiwa dan keadaan yang berakibat timbulnya unefisiensi operasi manajemen.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Kebijaksanaan peraturan dan prosedur-prosedur pelaksanaan itu ditetapkan oleh manajemen sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan.

Sistem pengadilan intern beserta mekanismenya diciptakan untuk manajemen bahwa semua kebijakan, peraturan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan itu selalu dipatuhi oleh perusahaan.”

2.1.2.3 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Menurut Numalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016: 181) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan dilingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Adapun Penjelasan Indikator Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian.

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.

- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- g. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko.

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Penaksiran risiko mencakup:

- a. Identifikasi Risiko. Mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.
- b. Analisis Risiko. Menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

3. Kegiatan Pengendalian.

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian antara lain:

- a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian atas peneglolaan sistem informasi.
- d. Penetapan review atas indikator dan ukuran kerja.
- e. Pemisahan fungsi.
- f. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
- g. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- h. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
- i. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi.

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi yang disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan.

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian kualitas laporan keuangan pemerintah yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:8) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua mengemukakan bahwa :

“Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya merupakan keempat karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki”.

Pengertian laporan keuangan pemerintah daerah yang dikemukakan oleh Baldrick (2015:12) :

“Laporan keuangan pemerintah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut”.

Sementara menurut M. Yusuf (2013:1) mengemukakan bahwa :

“Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stakeholder yang di dalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca (kini dikenal sebagai “laporan posisi keuangan”) daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah proses yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi dan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang memerlukannya.

2.1.3.2 Tujuan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun tujuan laporan keuangan secara umum dan khusus yang dikemukakan Erlina, dkk (2015:20) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermamfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”.

Sedangkan tujuan laporan keuangan secara khusus sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara khusus adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya”.

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.

2.1.3.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Deddi Nordiawan, dkk (2012:131) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.

Menurut Erlina, dkk (2015:8) Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

- 1) “Relevan.
- 2) Andal.
- 3) Dapat dibandingkan.
- 4) Dapat dipahami.“

Adapun penjelasan indikator laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1) Relevan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu.

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap.

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

a) Penyajian jujur.

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (*verifiability*).

Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas.

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut wahyono (2004:12) mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

“Dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (keterandalan) di sini menyangkut dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan sumber daya menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Kemudian menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau yang menghasilkan informasi tersebut, yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya di bidang akuntansi. Di sini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan)”.

Menurut Mardiasmo (2002:142) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

“Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya”.

Menurut Dewi Andini (2015:1) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

“Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan”.

Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian sebelumnya Nikke Yusnita Mahardini dan Ade Miranti (2018), menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Selanjutnya penelitian I Wayan Karsana dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana ISSN: 2302-8556 (2017), menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

Kemudian menurut M. Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR. Sri Pancawati Martiningsih P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 (2016), menyatakan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

2.2.2 Sistem Pengendalian internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Menurut Hall (2007:182) mengemukakan bahwa:

“Fungsi dari sistem pengendalian internal yaitu sebagai pelindung yang melindungi aktiva perusahaan dari banyaknya peristiwa yang tidak diinginkan yang menyerang perusahaan. Ini semua meliputi usaha untuk akses secara tidak sah ke aktiva perusahaan, penipuan yang dilakukan oleh orang dalam dan luar perusahaan, kesalahan karena karyawan tidak kompeten, program komputer salah data input yang rusak, dan lain sebagainya”.

Adapun menurut Mahmudi (2007: 27) menyatakan bahwa:

“Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah”.

Menurut Akhmad Syarifudin (2014) yang menyatakan:

“Dengan adanya penerapan Sistem Pengendalian Internal sangat membantu manajemen pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam rangka meningkatkan keandalan laporan keuangan”.

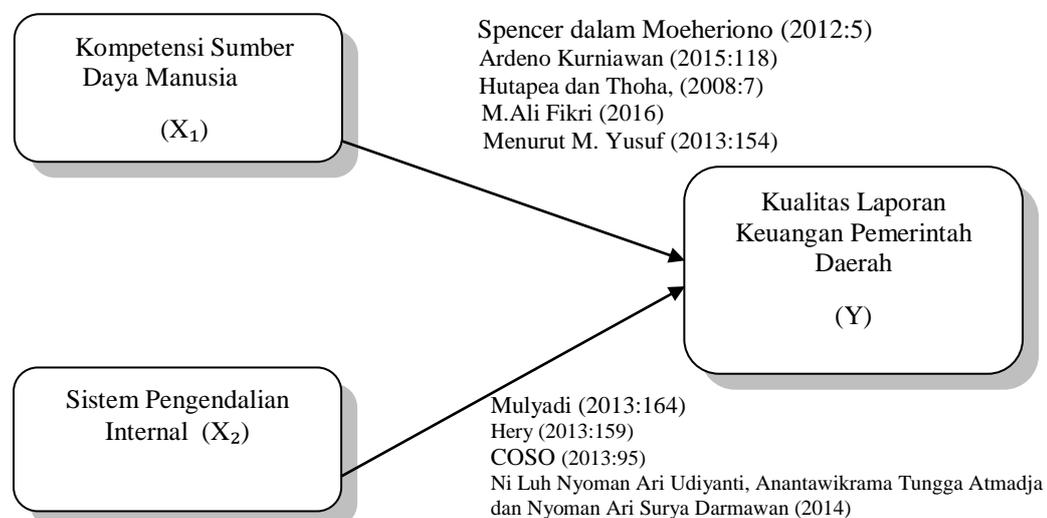
Berdasarkan pemaparan diatas tentang Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian sebelumnya Liziana Widari, Sutrisno ISSN:20886969 (2017), menyatakan bahwa Terdapat pengaruh positif dan signifikan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan

Selanjutnya penelitian Febriyani Moha, Lintje Kalangi, Jessy D.L Warongan ISSN 2303-1174 (2017), menyatakan bahwa Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah

Kemudian menurut Tuti Herawati ISSN : 1693-4482 (2014), menyatakan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.2.3 Bagan Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:99) Hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian pustaka, perumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas maka dalam penelitian ini dapat di-rumuskan hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:

H₁: Kompetensi Sumber daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₂: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.